

Analysis of Poverty and Unemployment Reduction Strategies in the Highlands of North Sumatra by the North Sumatra Regional Development Planning Agency (Bappedasu)

Analisis Strategi Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran di Wilayah Dataran Tinggi Sumatera Utara oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sumatera Utara (Bappedasu)

Nadia Mayang Rukmana¹⁾; Marliyah²⁾

^{1,2)} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: ¹⁾ Nadiarukmana8@gmail.com; ²⁾ marliyah@uinsu.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received [8 April 2022]

Revised [13 April 2022]

Accepted [17 April 2022]

KEYWORDS

Strategy, Poverty and Unemployment Reduction, North Sumatra Regional Development Planning Agency

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Strategi Penanggulangan Kemiskinan Dan Pengangguran Di Wilayah Dataran Tinggi Sumatera Utara Oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sumatera Utara (Bappedasu) dan mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sumatera Utara dalam Penanggulangan Kemiskinan Dan Pengangguran Di Wilayah Dataran Tinggi Sumatera Utara. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sumatera Utara adalah suatu instansi atau lembaga pemerintah yang bertujuan untuk mengkoordinir pembangunan di daerah Sumatera Utara. Penelitian ini dilakukan di Badan Perencanaan Pembangunan dan Daerah Sumatera Utara (BAPPEDASU). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian eksploratif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, strategi sampel purposive digunakan untuk merekrut informan. Dengan hasil penelitian bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sumatera Utara masih belum sesuai dengan yang diharapkan atau belum menjalankan tugas secara keseluruhan. Hal tersebut dilihat dari belum tercapainya sasaran pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 khususnya di wilayah dataran tinggi. Dan faktor-faktor yang menghambat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sumatera Utara adalah nilai tukar rupiah yang menunjukkan peningkatan, kurangnya balai latihan kerja, rendahnya kepercayaan public, rendahnya angka lanjut sekolah dari jenjang SMA/SMK ke Perguruan Tinggi dikarenakan kondisi keluarga kurang mampu, serta penyebaran Covid19.

ABSTRACT

This study aims to determine the Strategy for Reducing Poverty and Unemployment in the Highlands of North Sumatra by the Regional Development Planning Agency of North Sumatra (Bappedasu) and to find out what factors hinder the performance of the Regional Development Planning Agency of North Sumatra in Reducing Poverty and Unemployment in the Plains Region. North Sumatra High. The North Sumatra Regional Development Planning Agency is an agency or government agency that aims to coordinate development in the North Sumatra area. This research was conducted at the North Sumatra Regional and Development Planning Agency (BAPPEDASU). This study uses qualitative research methods with the type of exploratory research with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. In this study, a purposive sample strategy was utilized to recruit informants. With the results of the research that the Regional Development Planning Board of North Sumatra is still not as expected or has not carried out its overall task. This can be seen from the fact that the development target of North Sumatra Province in 2021 has not been achieved, especially in the highlands. And the factors that hinder the North Sumatra Regional Development Planning Agency are the rupiah exchange rate which shows an increase, the lack of job training centers, low public trust, the low rate of continuing schooling from high school / vocational school to university due to poor family conditions, and the spread of Covid19.

PENDAHULUAN

Hampir semua provinsi di Indonesia saat ini menghadapi masalah yang sudah berlangsung lama seperti kemiskinan dan pengangguran. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia masih tinggi. Kemiskinan dan pengangguran yang berlebihan dapat berdampak langsung atau tidak langsung terhadap kejahatan dan eskalasi masalah sosial politik. Adanya kemiskinan dan pengangguran dapat mengurangi pendapatan masyarakat sehingga mengakibatkan tingkat kemakmuran negara juga berkurang. Kemiskinan dan pengangguran juga dapat menimbulkan berbagai masalah ekonomi dan sosial, masalah konsumsi, kesehatan, serta prospek pembangunan di masa yang akan datang.

Kemiskinan dan pengangguran telah menjadi citra yang menakutkan, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Negara berkembang seringkali dihadapkan dengan besarnya angka kemiskinan dan pengangguran karena sikap masyarakat yang menerima apa adanya, tidak bersungguh-sungguh dalam berusaha, kondisi fisik yang tidak sempurna, perubahan iklim, kerusakan alam, kehidupan sosial, struktur sosial, sempitnya lapangan pekerjaan, besarnya jumlah penduduk, kebijakan dan program pemerintah yang tidak merata serta ketimpangan-ketimpangan lainnya.

Perkembangan tingkat kemiskinan di Sumatera Utara pada periode tahun 2009 – 2021 ditunjukkan pada dibawah ini. Tingkat kemiskinan mencakup besaran jumlah dan persentase dari penduduk miskin. Pada periode tersebut perkembangan tingkat kemiskinan di Sumatera Utara relatif berfluktuasi dari tahun ke tahun.

Grafik 1. Jumlah (000 Jiwa) dan Persentase (%) Penduduk Miskin Sumatera Utara Maret 2009 – Maret 2021



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Maret 2009- Maret 2021

Secara absolut jumlah penurunan penduduk miskin pada periode Maret 2009 – Maret 2021 sebesar 155,82 ribu jiwa, yaitu dari 1.499,68 ribu jiwa pada Maret 2009 menjadi 1.343,86 ribu jiwa pada Maret 2021. Secara relatif juga terjadi penurunan persentase penduduk miskin dari sebesar 11,51 persen pada Maret 2009 menjadi 9,01 persen pada Maret 2021.

Pada Maret 2021 persentase penduduk miskin di Sumatera Utara berada di bawah persentase penduduk miskin Indonesia, akan tetapi persentase penduduk miskin di Sumatera Utara masih cukup tinggi apabila dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia, dan menempati peringkat ke-17 dari 34 provinsi. Persentase penduduk miskin di Indonesia adalah 10,14 persen dan Sumatera Utara 9,01 persen.

Sumatera Utara dibagi dalam 3 (tiga) kelompok wilayah/kawasan yaitu Pantai Barat, Dataran Tinggi, dan Pantai Timur. Kawasan Pantai Barat meliputi Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Nias Selatan, Kota Padangsidimpuan, Kota Sibolga dan Kota Gunungsitoli. Kawasan dataran tinggi meliputi Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Dairi, Kabupaten Karo, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Samosir, dan Kota Pematangsiantar. Kawasan Pantai Timur meliputi Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Asahan, Kabupaten Batubara, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Langkat, Kabupaten Serdang Bedagai, Kota Tanjungbalai, Kota Tebing Tinggi, Kota Medan, dan Kota Binjai.

Daerah yang menjadi sorotan dalam penelitian ini terkhusus pada masyarakat di Wilayah Dataran Tinggi Sumatera Utara. Wilayah Dataran Tinggi Sumatera Utara sebagai daerah tengah provinsi yang berjarak Pegunungan Bukit Barisan. Di pegunungan inilah disebut dataran tinggi yang merupakan kantong-kantong konsentrasi penduduk. Daerah di sekitar Danau Toba dan Pulau Samosir juga menjadi tempat tinggal penduduk yang menggantungkan hidupnya kepada danau ini.

Upaya pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan belum membuahkan hasil yang optimal. Meski jumlah penduduk miskin sudah ditekan, namun jumlahnya masih cukup signifikan. Kehidupan orang miskin tidak banyak berubah dalam hal kualitas karena mereka masih bersifat sukarela dan subsisten. Hal ini disebabkan oleh kebijakan yang konsisten dalam mengatasi masalah kemiskinan di setiap lokasi. Sedangkan setiap daerah memiliki keunikan tersendiri dalam hal sumber daya alam,



sumber daya manusia, dan budaya. Akibatnya, pengentasan kemiskinan di setiap daerah memerlukan metode yang unik dan lebih baik lagi.

Fenomena yang terjadi dilapangan adalah masih banyaknya Kemiskinan dan Pengangguran di Wilayah Dataran Tinggi Sumatera Utara, Wilayah Dataran Tinggi ini terdiri dari Kabupaten Simalungun, Pematang Siantar, Karo, Humbang Hasundutan, Samosir, Dairi, Tapanuli Utara, Pakpak Barat, dan Toba Samosir, wilayah Dataran Tinggi merupakan wilayah dengan rata-rata kemiskinan pada tahun 2019 sebesar 9.11 persen, angka ini lebih besar dari capaian provinsi pada tahun 2019 sebesar 8.63 persen dan diketahui rata-rata TPT pada tahun 2019 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2018 yaitu dari 2.90 (2018) turun menjadi 2.50 (2019), kondisi ini jauh lebih buruk dari capaian TPT Provinsi Sumatera utara tahun 2019 sebesar 5.41 persen. Penurunan terjadi hampir pada semua kab/kota di wilayah dataran Tinggi. Besarnya jumlah penduduk miskin dan tingkat pengangguran terbuka tersebut berpotensi menciptakan permasalahan social yang rumit, seperti menurunnya kualitas sumber daya manusia, munculnya ketimpangan dan kecemburuan social, terganggunya stabilitas social politik, meningkatnya angka kriminalitas dan dampak-dampak lainnya. Jika kondisi tersebut berlangsung terus-menerus, maka dapat menghambat perkembangan ekonomi Sumatera Utara sehingga menyulitkan terwujudnya Sumatera Utara maju, bermatahat, dan hidup sejahtera lalu sesuai dengan tugasnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan menjadi kewenangan Provinsi. Maka dengan itu hal-hal yang berkaitan dengan fungsi penunjang urusan pemerintah juga termasuk ke dalam tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sumatera Utara.

Berdasarkan permasalahan yang sudah dipaparkan diatas, penulis memiliki ketertarikan untuk menganalisis lebih lanjut terkait bagaimana Strategi Penanggulangan Kemiskinan Dan Pengangguran dengan mengangkat judul Analisis Strategi Penanggulangan Kemiskinan Dan Pengangguran Di Wilayah Dataran Tinggi Sumatera Utara Oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sumatera Utara (Bappedasu)

LANDASAN TEORI

Teori pada dasarnya merupakan suatu tahapan untuk membedah dan juga menganalisis persoalan tema penelitian, sehingga bisa lebih jelas obyek dan ruang lingkup kajiannya. Adapun beberapa kajian dan teori yang bisa dijelaskan dalam penelitian ini, antara lain:

Pengertian Strategi

Kata strategi berasal dari kata Yunani strategeia, yang berarti "seni atau keterampilan menjadi seorang jenderal". Strategi juga dapat diartikan suatu rencana untuk pembagian dan penggunaan kekuatan militer pada daerah-daerah tertentu untuk mencapai tujuan tertentu.

Strategi dapat diartikan sebagai suatu rencana yang disusun oleh manajemen puncak untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Rencana ini meliputi: tujuan, kebijakan, dan tindakan yang harus dilakukan oleh suatu organisasi dalam mempertahankan eksistensi dan menenangkan persaingan, terutama perusahaan atau organisasi harus memiliki keunggulan kompetitif.

Strategi adalah rencana (planning) berskala besar, dengan orientasi masa depan, bertujuan untuk berinteraksi dengan kondisi persaingan dan ancaman dalam menuju tujuan instansi/organisasi. atau dengan kata lain, strategi adalah sebuah tindakan proses perencanaan untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan sebelumnya, dengan melakukan hal-hal yang bersifat terus menerus sesuai keputusan bersama dan berdasarkan sudut pandang kebutuhan masyarakat.

Lebih lanjutnya bahwa startegi merupakan suatu rencana yang dibuat untuk mencapai tujuan yang di harapkan. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan yang di harapkan dengan baik, seseorang/instansi harus mampu merancang sekreatif mungkin dan selalu memastikan apakah pelaksanaan yang dilakukan oleh perusahaan berjalan dengan baik, tepat dan efisiensi.

Organisasi

Organisasi berasal dari kata organon dalam Bahasa Yunani yang artinya alat. Menurut Louis A. Allen: "Organisasi sebagai proses penentuan dan pengelompokkan pekerjaan yang akan dikerjakan, menetapkan dan melimpahkan wewenang dan tanggung jawab dengan maksud untuk memungkinkan orang-orang bekerja sama secara efektif dalam mencapai tujuan". Sedangkan menurut James D. Mooney: "Organisasi adalah setiap bentuk perserikatan manusia, untuk mencapai tujuan bersama".

Kemiskinan dan Pengangguran

Secara harfiah kamus besar Bahasa Indonesia, miskin itu berarti tidak berharta benda. Miskin juga berarti tidak mampu mengimbangi tingkat kebutuhan hidup standard dan tingkat penghasilan dan

ekonominya rendah. Secara singkat kemiskinan dapat didefinisikan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah yaitu adanya kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standard kehidupan yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Sedangkan Secara umum kemiskinan diartikan sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup pokok atau dasar. Mereka yang dikatakan berada di garis kemiskinan adalah apabila tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok.

Pengertian kemiskinan yang perlu diketahui dan dipahami adalah Lebagai berikut: (1) Kriteria BPS, kemiskinan adalah suatu kondisi seseorang yang hanya dapat memenuhi makanannya kurang dari 2.100 kalori per kapita per hari; (2) Kriteria BKKBN, kemiskinan adalah keluarga miskin prasejahtera apabila: Tidak dapat melaksanakan ibadah menurut agamanya, Seluruh anggota keluarga tidak mampu makan dua kali sehari, Seluruh anggota keluarga tidak memiliki pakaian berbeda untuk di rumah, bekerja atau sekolah dan bepergian, Bagian ter as dari rumahnya berlantai tanah, dan Tidak mampu membawa anggota keluarga ke sarana kesehatan; serta (3) Kriteria Bank Dunia, kemiskinan adalah keadaan tidak tercapainya kehidupan yang layak dengan penghasilan USD 1,00 per hari.

Pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau berencana untuk memulai usaha baru, atau penduduk yang tidak sedang mencari pekerjaan tetapi sudah diterima tetapi belum mulai bekerja, menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dalam indikator ketenagakerjaan.

Pengangguran adalah sebuah golongan angkatan kerja yang belum melakukan suatu kegiatan yang menghasilkan uang. Pengangguran tidak terbatas pada orang yang belum bekerja. Orang yang sedang mencari pekerjaan dan orang yang bekerja namun pekerjaannya tidak produktif pun dapat dikategorikan sebagai pengangguran.

Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran

Menurut KBBI Penanggulangan/pe-nang-gu-lang-an/ n adalah menghadapi, mengatasi, proses, cara, dan perbuatan untuk menanggulangi. Penanggulangan adalah tindakan yang bersifat menyembuhkan yang berarti semua tindakan untuk mencegah, mengatasi dan upaya menghadapi akibat-akibat atas terjadinya suatu hal. Sehingga dapat disimpulkan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran adalah mencegah, mengatasi dan upaya untuk menangani penyebab dari kemiskinan dan pengangguran.

Penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan yang harus konsisten dilakukan oleh pemerintah. Penanggulangan kemiskinan sebagai bentuk kebijakan pembangunan merupakan tanggung jawab semua elemen baik itu pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat. Hal ini didasari oleh kenyataan bahwa kemampuan keuangan pemerintah dalam mendanai pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan sangat terbatas. Oleh karena itu diperlukan pemahaman tentang peran strategis yang harus dilakukan.

Strategi penanggulangan kemiskinan yang sangat menentukan keberhasilan dalam penanggulangan kemiskinan adalah harus ada pendamping di lapang yang profesional ahli dibidang pemberdayaan masyarakat, mempunyai pengetahuan agama Islam yang mumpuni dan mempunyai pengetahuan entrepreneurship, dll. Pendampingan lapangan itulah yang memfasilitasi tahapan pelaksanaan awal sampai akhir penanggulangan kemiskinan berjalan berhasil memberdayakan masyarakat miskin.

Kebijakan penanggulangan kemiskinan yang komprehensif memerlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha (sektor swasta) dan masyarakat merupakan pihak-pihak yang bertanggung jawab sama memiliki terhadap penanggulangan kemiskinan. Pemerintah telah melaksanakan penanggulangan kemiskinan melalui berbagai program dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar warga negara secara layak, meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat miskin, penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat serta melaksanakan percepatan pembangunan daerah tertinggal dalam upaya mencapai masyarakat Indonesia yang ahtera, demokratis dan berkeadilan.

Kemiskinan dan pengangguran secara tradisional terkait, dan tidak sekedar bergantung pada kemajuan ekonomi dan faktor pendukung lainnya. Namun, yang tak kalah pentingnya adalah pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan penegakan keadilan sejati bagi penduduk kelas atas dan bawah. Memotivasi penduduk untuk berpindah dari pekerja upahan (upah kerja) menjadi wiraswasta akan terdongkrak jika sumber daya manusia (wirausahawan) diberdayakan.

Strategi dan kebijakan alternatif menanggulangi kemiskinan di desa dapat dilakukan dengan cara:

Memberikan kesempatan luas kepada masyarakat desa memperoleh layanan pendidikan memadai dan gratis. Pemerintah perlu mengembangkan sistem pendidikan nasional yang berorientasi keberpihakan kepada orang miskin. Pendidikan yang ditawarkan di Indonesia cenderung mahal dan sulit



dijangkau orang miskin. Karenanya, mereka memilih tidak menyekolahkan anak mereka, sebab beban biaya pendidikan tidak sebanding kemampuan keuangan mereka.

Redistribusi lahan dan modal pertanian yang seimbang. Ketimpangan kepemilikan lahan pertanian, memperlebar jurang kemiskinan antar-masyarakat di pedesaan. Sebagian besar tanah pertanian dimiliki tengkulak lokal dan tuan tanah. Akibatnya, tanah pertanian tidak memberikan penghasilan cukup bagi orang desa yang memiliki tanah dan modal pertanian terbatas.

Mendorong perkembangan investasi pertanian dan pertambangan ke daerah pedesaan. Pembukaan investasi pertanian dan pertambangan dapat memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat desa. Dengan begitu, pendapatan mereka akan meningkat dan berpengaruh pada perubahan kesejahteraan hidup

Membuka kesempatan luas kepada masyarakat desa memperoleh kredit usaha yang mudah. Sistem kredit saat ini (seperti KUR), belum memberikan kemudahan usaha bagi masyarakat desa dan sering salah sasaran. Karena itu, diperlukan kebijakan baru yang memberikan jaminan kredit usaha memadai bagi masyarakat desa.

Memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan masyarakat desa. Dapat dilakukan melalui mekanisme lumbung desa yang memberikan kesempatan sama kepada masyarakat, memperoleh sumber kebutuhan secara terorganisir.

Memperkenalkan sistem pertanian modern dengan teknologi baru yang memberikan kemudahan bagi masyarakat menggali sumber pendapatan yang memadai. Teknologi pertanian diperbanyak dan diberikan cuma-cuma kepada petani untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan mempermudah pemenuhan kebutuhan hidup mereka.

Memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat dengan sistem layanan kesehatan gratis, memperbanyak PUSKESMAS dan unit layanan kesehatan kepada masyarakat desa.

Memberikan jaminan asuransi dan jaminan sosial terhadap masyarakat desa. Jaminan ini dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin dan memberikan semangat hidup yang lebih berarti. Sistem yang ada saat ini, meskipun diperuntukkan bagi seluruh rakyat Indonesia namun mekanismenya tetap menyulitkan masyarakat miskin, terutama di desa yang tidak melek sistem jaminan. Untuk itu, pemerintah berkewajiban memberikan jaminan asuransi memadai kepada masyarakat miskin.

Memperkuat komitmen eksekutif dan legislatif untuk memperbaiki tatanan pemerintahan. Tatanan pemerintahan dewasa ini, memberikan keleluasaan terjadinya praktik korupsi dalam seluruh level pemerintahan. Perbaikan tatanan pemerintahan, menjadi keyword program penanggulangan kemiskinan bagi masyarakat miskin.

Mendorong agenda pembangunan daerah memprioritaskan pemberantasan kemiskinan sebagai skala prioritas utama, membangkitkan kesadaran kolektif agar memahami kemiskinan sebagai musuh bersama, dan meningkatkan partisipasi semua pihak dalam membrantas kemiskinan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif, yaitu menggambarkan suatu keadaan, fenomena sosial, atau hubungan dengan sangat rinci. Gambaran tersebut diperoleh dari data-data yang direduksi dan disajikan dalam bentuk gambar atau tabel. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai peran pemerintah daerah dalam menanggulangi tingkat kemiskinan dan pengangguran di daerah penelitian. Secara khusus, untuk memberikan gambaran dalam (1) menganalisis keragaan dan strategi penanggulangan kemiskinan dan pengangguran di daerah Dataran Tinggi Sumatera Utara; (2) mengidentifikasi permasalahan kemiskinan dan pengangguran dan peran pemerintah daerah dalam penanggulangannya; dan (3) merumuskan strategi dan kebijakan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran di Dataran Tinggi Sumatera Utara.

Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Sumatera Utara. Penelitian ini menyangkut Strategi Penanggulangan Kemiskinan Dan Pengangguran Di Wilayah Dataran Tinggi Sumatera Utara Dan Ekonomi Daerah sebagai lembaga yang mengetahui tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Dan Pengangguran Di Wilayah Dataran Tinggi Sumatera Utara Oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sumatera Utara (Bappedasu).

Penelitian berikutnya Dinas Pemberdayaan masyarakat dan desa. Hasil telaahan Pokir DPRD setelah dilakukan pemetaan terhadap kewenangan dirumuskan dalam permasalahan sebagaimana di Wilayah Dataran Tinggi Sumatera Utara, Masyarakat memohon perhatian serius kepada pemerintah provinsi Sumatera Utara terkait upaya pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan dan pengangguran di

Wilayah Dataran Tinggi Sumatera Utara yang belum membuahkan hasil secara optimal. Lalu minimnya peran dan fungsi desa untuk meningkatkan potensi ekonomi dalam berbagai sektor yang dapat digerakkan melalui program pemberdayaan masyarakat dan desa.

Informan Penelitian

Peneliti menggunakan informan sebagai objek informasi dalam penelitian ini terkait dengan strategi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara. Fakta yang dibutuhkan meliputi kata-kata atau tindakan yang memberikan data dan informasi tentang strategi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sumatera Utara dalam Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran di Wilayah Dataran Tinggi Sumatera Utara.

Dalam penelitian ini, strategi sampel purposive digunakan untuk merekrut informan., yaitu teknik penentuan sample dengan pertimbangan tertentu yang dibuat oleh peneliti. Adapun informan dalam penelitian ini adalah Kepala Subbag Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik dapat memberikan jawaban-jawaban yang peneliti inginkan. Kemudian informan selanjutnya Kepala Sub Bidang Perencanaan Ekonomi dan SDA. Kemudian masyarakat yang mengalami kondisi kemiskinan dan pengangguran di wilayah dataran tinggi Sumatera Utara yang teknik pemilihannya secara incidental atau kebetulan pada saat penelitian.

Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang dikumpulkan sebagai berikut:

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara yang berkaitan tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Dan Pengangguran Di Wilayah Dataran Tinggi Sumatera Utara Oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sumatera Utara (Bappedas). Adapun data primer dalam penelitian ini adalah melalui wawancara terhadap pihak-pihak yang bersangkutan atau dianggap mengetahui diantaranya, Kepala Subbag Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik dan Kepala Sub Bidang Perencanaan Ekonomi dan SDA dan masyarakat yang mengalami kondisi kemiskinan dan pengangguran di wilayah dataran tinggi Sumatera Utara.

Data sekunder adalah data yang telah jadi dan siap pakai seperti dokumen-dokumen, hasil-hasil penelitian lainnya. Berikut adalah data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Data Kemiskinan dan Pengangguran Sumatera Utara
2. Data Identitas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Data RKPD Provinsi Sumatera Utara 2020
4. Data RKPD Provinsi Sumatera Utara 2021
5. Data RPJMN 2020-2024
6. Data Renstra 2019

Analisis Data

Dalam pekerjaan ini, data dan informasi dikumpulkan dengan menggunakan pendekatan wawancara. Wawancara dilakukan untuk menggali informasi tentang peran pemerintah daerah dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran di daerah objek penelitian. Wawancara mendalam (in-depth interview) dilakukan dengan sejumlah informan yang telah ditentukan. Selain wawancara mendalam, digunakan juga diskusi kelompok terarah (FGD). Selain menggunakan teknik wawancara, pengumpulan data dan informasi di lapangan juga dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap dokumen-dokumen terkait, seperti laporan-laporan instansi, peraturan perundang-undangan, arsip-arsip penting, dan lain-lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sasaran dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran di Wilayah Dataran Tinggi

Peran Pemerintah Sumatera Utara dalam menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran tertuang pada beberapa kebijakan dan strategi yang dijalankan oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dibawahnya. Sasaran pembangunan tahun 2021 diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup sasaran makro ekonomi khususnya perekonomian Sumatera Utara yang terdampak pandemi Covid-19 dengan indikator pembangunan sebagaimana pada Tabel 1. dibawah ini:

Tabel 1 Indikator Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021

Indikator Pembangunan	Proyeksi Target 2021 Dampak COVID-19
Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,7 – 5,7
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	7,1-7,5
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70,42
Tingkat Kemiskinan (%)	9,2–9,7
Usia Harapan Hidup	69,25
Rata-Rata Lama Sekolah	9,25
Harapan Lama Sekolah	13,11
Rasio Gini (indeks)	0,320

Berdasarkan tema, fokus, dan sasaran pembangunan tahun 2021, maka arah kebijakan yang ditempuh pada RKPD 2021 adalah “Pembangunan Sumber Daya Manusia Unggul, Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dalam Percepatan Pemulihan Ketahanan Ekonomi dan Kehidupan Masyarakat” dengan menitik beratkan pelaksanaan pembangunan pemulihan ketahanan ekonomi pada sektor strategis (Pariwisata, Perdagangan, industri, pertanian dan UMKM) dan pemulihan kehidupan masyarakat maka Fokus Pembangunan RKPD Sumatera Utara tahun 2021 yaitu:

1. Peningkatan Kompetensi SDM Unggul
2. Perluasan Akses Pendidikan Menengah, Kejuruan dan Khusus
3. Interkoneksi pusat pertumbuhan dan produktivitas regional
4. Peningkatan jangkauan layanan Kesehatan
5. Meningkatkan nilai tambah sektor pertanian dan mempromosikan pariwisata berkelanjutan
6. Pemulihan Pandemi COVID-19

Untuk mendukung Fokus Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 tersebut strategi pembangunan dituangkan kedalam 5 (lima) Prioritas Provinsi Sumatera Utara yaitu:

1. Meningkatkan lapangan kerja dan prospek usaha melalui penciptaan lapangan kerja;
2. Peningkatan dan pemenuhan akses Pendidikan;
3. Pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan;
4. Penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas;
5. Meningkatkan daya saing melalui industri pertanian dan pariwisata.

Wilayah Dataran Tinggi terdiri dari 9 Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Karo, Kabupaten Dairi, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Samosir, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Toba, Kabupaten Simalungun dan Kota Pematang Siantar.

Kondisi umum wilayah Dataran Tinggi dapat dilihat dari 5 indikator makro ekonomi yaitu Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka, Gini Ratio, Indeks Pembangunan Manusia dan Tingkat kemiskinan.

Pertumbuhan Ekonomi di wilayah Dataran Tinggi pada tahun 2018 rata-rata tumbuh sebesar 5.05 persen lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara tahun 2019 sebesar 5.22 persen. Dilihat dari indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), diketahui rata-rata TPT pada tahun 2019 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2018 yaitu dari 2.90 (2018) turun menjadi 2.50 (2019), kondisi ini jauh lebih buruk dari capaian TPT Provinsi Sumatera utara tahun 2019 sebesar 5.41 persen. Penurunan terjadi hampir pada semua kab/kota di wilayah dataran Tinggi.

Dilihat dari kondisi kemiskinan, wilayah Dataran Tinggi merupakan wilayah dengan rata-rata kemiskinan pada tahun 2019 sebesar 9.11 persen, angka ini lebih besar dari capaian provinsi pada tahun 2019 sebesar 8.63 persen, dan menurun dibanding capaian wilayah Dataran Tinggi pada tahun 2018 sebesar 9.49 persen. Sementara rata-rata gini ratio pada tahun 2019 sebesar 0.291.

Indeks Pembangunan Manusia di wilayah Dataran Tinggi mengalami Peningkatan, rata-rata IPM pada tahun 2019 sebesar 71.90 lebih baik dibandingkan tahun 2018 yaitu sebesar 72.48 IPM Tertinggi pada tahun 2019 ada di Kota Pematang Siantar.

Berdasarkan capaian makro ekonomi wilayah Dataran Tinggi tersebut, maka terdapat berbagai upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan ketercapaian pada tahun 2021 diantaranya dengan:

1. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia unggul yaitu melalui:
 - a. Percepsion Pojok UMKM di Seluruh Kab / Kota Wilayah Dataran Tinggi

- b. Penyediaan Pusat Kreativitas Anak
- c. Penguatan Standard Mutu Produk IKM menuju Ekspor
- d. Bantuan Kelompok Usaha Bersama Masyarakat Miskin Produktif, Daerah Pesisir Nelayan 200 KK
- e. Paket Kelompok Usaha Bersama Masyarakat Miskin Pedesaan 200 KK
- f. Penguatan UKM Go Ekspor dan Go Digital
- g. Pembentukan Sentra IKM Olahan Kopi
2. Perluasan akses pendidikan menengah melalui:
 - a. Guru Terbang/Guru Lintas Sekolah sebanyak 10 Guru
 - b. Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA/SMK/SLB Negeri
 - c. Pembangunan Unit Sekolah Baru (2 SMA dan 3 SMK)
 - d. Pembangunan Perpustakaan
 - e. Pembangunan Laboratorium Praktek SMA
3. Konektivitas antar pusat pertumbuhan wilayah dan pusat-pusat produktivitas melalui:
 - a. Peningkatan ruas jalan provinsi
4. Peningkatan jangkauan layanan kesehatan melalui:
 - a. Penyediaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
 - b. Penyediaan makanan tambahan bagi Ibu Hamil dan balita kurus
 - c. Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
 - d. Dokter Terbang dan Dukungan Layanan Medis bergerak pada daerah rawan bencana dan sulit aksesibilitas atau terpencil
 - e. Pembentukan Puskesmas Ramah Anak
5. Peningkatan Nilai Tambah Sektor Agraris Dan Pariwisata Berkelanjutan melalui:
 - a. Pengembangan Wisata
 - b. Pengembangan Perkebunan Komoditi
 - c. Pengembangan Desa Pariwisata Produktif
 - d. Pengembangan Kawasan Peternakan Terpadu
 - e. Pengembangan Daerah Agrowisata berbasis Komoditas
 - f. Pengadaan Pabrik Pakan Mini
 - g. Rehabilitasi dan Reboisasi Lahan Kritis
6. Pemulihan pandemi covid-19 melalui:
 - a. Pemulihan Ketahanan ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat melalui penyiapan fasilitas dan layanan Kesehatan, pengaman sosial dan stimulus ekonomi wilayah Pantai Timur.

Selain itu untuk mendukung pencapaian Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara tahun 2021, arah kebijakan wilayah Dataran Tinggi diarahkan untuk mendukung kegiatan terintegrasi Membangun Desa Menata Kota (MDMK) sebagai berikut:

1. Masyarakat Miskin Produktif (MAMIPRO) melalui Pemberian Bantuan dan Pelatihan di wilayah Dataran Tinggi.
2. Dokter Terbang melalui Penyediaan tenaga dokter spesialis/ sub spesialis pada RSUD Rujukan Regional/ RSUD di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional dan Puskesmas sasara dengan Lokus Kota Pematang Siantar.
3. Desa /Kota Sehat Bermartabat melalui Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Kabupaten/Kota Sehat, Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) 5 Pilar) di wilayah Dataran Tinggi.
4. Peningkatan Produktivitas Padi 8 ton/ha melalui Bantuan Saprodi, Alsintan, Rehab irigasi tersier Pembangunan PLTS Terpusat (Samosir) dengan Lokus Kab. Simalungun, Kab. Toba, Kab. Karo, Kab. Humbang Hasundutan dan Samosir.
5. Kawasan Peternak Terpadu 1 melalui Pembangunan sarpras ternak terpadu pada lahan seluas 22 Ha (Hibah PD Perkebunana), Pengadaan bibit ternak, Tempat edukasi dan wisata agro ternak dengan Lokus kab. Hubang Hasundutan, Kab. Karo dan Kab, Toba.
6. Desa wisata bunga dan buah mellalui pengembangan dan penataan kawasan dengan Lokus Kab. Karo.
7. Pemantapan penerapan e-Government (Sumut Smart Province) di wilayah dataran tinggi.

Faktor-Faktor yang Menghambat Strategi Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sumatera Utara



- a. Disebabkan oleh Nilai Tukar Petani di Sumatera Utara selama beberapa periode terakhir belum menunjukkan peningkatan yang cukup berarti, sehingga diduga mempengaruhi tingkat kemiskinan di pedesaan.
- b. Masih belum maksimalnya optimalisasi Balai Latihan Kerja sehingga kurang terpenuhinya skill tenaga kerja kompeten yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan dapat pula terjadi jika investasi yang masuk tidak menyerap banyak tenaga kerja daerah.
- c. Masih rendahnya Angka Melanjutkan pendidikan dari SMA / SMK ke Perguruan Tinggi akibat kondisi ekonomi keluarga kurang mampu sehingga sehingga perlu kerjasama pemerintah untuk ikut membantu penyelenggaraan pendidikan (beasiswa).
- d. Rendahnya kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan dan adanya korupsi birokrasi. Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti terhadap rencana pelayanan yang ditujukan untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Kepercayaan publik dipengaruhi oleh komitmen dan kepatuhan terhadap keberlanjutan keberhasilan layanan publik dalam jangka panjang.
- e. Penyebaran Pandemi Corona Virus Desiase 2019 (Covid-19) yang melanda hampir seluruh belahan dunia, termasuk di Sumatera Utara yang berdampak terhadap social dan ekonomi masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti mengenai Strategi Penanggulangan Kemiskinan Dan Pengangguran Di Wilayah Dataran Tinggi Sumatera Utara Oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sumatera Utara, maka dapat diambil kesimpulan berdasarkan capaian makro ekonomi wilayah Dataran Tinggi tersebut, sehingga terdapat berbagai upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan ketercapaian pada tahun 2021 diantaranya dengan:

- a. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia unggul
- b. Perluasan akses pendidikan menengah
- c. Konektivitas antar pusat pertumbuhan wilayah dan pusat-pusat produktivitas
- d. Peningkatan jangkauan layanan kesehatan
- e. Peningkatan Nilai Tambah Sektor Agraris Dan Pariwisata Berkelanjutan
- f. Pemulihan pandemi covid-19

Faktor-faktor yang menghambat strategi penanggulangan kemiskinan dan pengangguran oleh badan perencanaan pembangunan daerah Sumatera Utara seperti nilai tukar rupiah yang menunjukkan peningkatan, kurangnya Balai Latihan Kerja, rendahnya kepercayaan publik, rendahnya angka lanjut sekolah dari jenjang SMA/SMK ke Perguruan Tinggi dikarenakan kondisi keluarga kurang mampu, serta penyebaran Covid19.

Dengan keterbatasan anggaran yang dimiliki sebaiknya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sumatera Utara betul-betul melihat skala prioritas mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu, diadakan pembinaan dan pelatihan agar sumber daya manusia yang lebih kompeten lagi, mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, meningkatkan pendapatan masyarakat miskin serta mengembangkan dan menjamin keberlanjutan UMK sehingga membentuk sinergi kebijakan yang unggul dengan program-programnya agar upaya penanggulangan Kemiskinan Dan pengangguran di wilayah dataran tinggi Sumatera Utara segera ditangani.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sumatera Utara seharusnya lebih tanggap dan cepat dalam menangani kemiskinan dan pengangguran. Karena hal ini merupakan permasalahan yang serius yang seharusnya bisa tertangani untuk memajukan Sumatera Utara.

DAFTAR PUSTAKA

- Budjo, Sesra, 'Strategi Manajemen Sekolah', Jurnal Menata, 2.2 (2019), 64
- Jalil, Abdul, Fahri M, and Sri Kasnelly, 'Meningkatnya Angka Pengangguran Di Tengah Pandemi (Covid-19)', 2.pengangguran akibat covid 19 (2020), 45-60
- Josep, Konsep Dan Strategi Pemerintah Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Jakarta: Indocamp, 2018)
- Rah Adi Fahmi, Ginanjar, Sugeng Setyadi, and Umayatu Suiro, 'Analisis Strategi Penanggulangan Kemiskinan Di Provinsi Banten', Jurnal Ekonomi-Qu, 8.2 (2018), 230
<<https://doi.org/10.35448/jequ.v8i2.4450>>
- 'RKPD Provsu Tahun 2021.Pdf'
- S.E., M.Si. Prof. Dr. Wilson Bangun, Manajemen Sumber Daya Manusia In Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi Revisi Jakarta: Bumi Aksara (Jakarta: Bumi Aksara, 2018)

- Siregar, Laila Syafrita, and Akhmad Ignace Hariman, 'Profil Kemiskinan Prov SU Tahun 2021', Badan Pusat Statistik, 2021, p. 66
<<https://sumut.bps.go.id/publication/2021/12/30/f5dd1603004f0e5eec509937/profil-kemiskinan-provinsi-sumatera-utara-maret-2021.html>> [accessed 6 March 2022]
- Subari, M, 'Strategi Penanggulangan Kemiskinan Dalam Perspektif Islam', Jurnal Studi Islam: Pancawahana, 15.1 (2020), 33
<<http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/pwahana/article/view/3874>>